

KEPEMIMPINAN DALAM PEMODERNAN INDONESIA DAN IMPLIKASI-IMPLIKASI SOSIAL KEAGAMAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Oleh Nurcholish Madjid

Indonesia merupakan suatu negeri dengan aneka pola budaya. Pandangan relativistis dan kecenderungan sinkretis yang kuat dari penduduknya, khususnya orang-orang Jawa, menjadikan budaya Indonesia paduan dari unsur-unsur budaya yang ada — animisme, Hinduisme, Budhisme, Islam, Kristen, sampai modernisme atau Westernisme.

Karena itu, sulit sekali bagi pemimpin bangsa Indonesia menggariskan suatu kebijaksanaan kultural tertentu berdasarkan suatu pola kultural tertentu yang sesuai dengan dan dapat diterima oleh seluruh rakyat. Memang, Indonesia merupakan suatu negara Muslim, yaitu sebuah negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim atau mengaku sebagai Muslim. Namun, metode penyebarannya (penetrasi damai) telah menyebabkan Islam tidak dianut secara mendalam dan hanya nominal di banyak wilayah negeri ini. Hal ini dikukuhkan oleh kenyataan bahwa Islam yang sadar diri, yang biasanya diwujudkan oleh kelompok-kelompok politik Islam, hanya terdapat pada hampir separuh penduduk yang, selama masa-masa penjajahan, tersisihkan hampir dalam setiap segi kehidupan, khususnya pendidikan.

Nasionalisme Indonesia yang mencoba mendapatkan dari keadaan-keadaan yang ada, atau menciptakan, sesuatu yang

baru yang sesuai dan dapat diterima oleh semua kelompok, sejauh ini tampaknya tak berhasil. Kultur nasional sejati bangsa ini memungkinkan seluruh orang Indonesia berkembang hanya melalui *nation building*, yang memakan waktu lama dan memerlukan keseriusan dan, pelatihan atas generasi baru yang memiliki pandangan yang sepenuhnya berbeda. Namun, agar bisa diterima, maka keseluruhan filsafat haruslah keindonesiaan, sejenis versi terselubung dan tak sejati suatu ideologi yang diterima di mana-mana, meski kita tidak pernah ragu mengadopsi, dari yang lain, teknik-teknik yang bermanfaat atau sesuai. Inilah juga gejala umum sikap Indonesia terhadap kultur asing.

Latar Belakang Kebijaksanaan Pembangunan

Atas dasar latar belakang budaya inilah Pancasila dirumuskan pada permulaan revolusi. Dimaksudkan sebagai sumber nilai, pijakan bersama dan dasar bagi Republik ini, Pancasila sejauh ini, tampak memuaskannya dan kini, secara praktis, merupakan ideologi tunggal bangsa.

Merupakan suatu pengalaman pahit bagi bangsa ini ketika Pancasila, dalam proses sejarahnya, menyimpang dari fungsinya sebagai suatu dasar berpijak dan nilai bersama ke semata-mata alat untuk manipulasi-manipulasi politik di tangan politisi-politisi tak bertanggung jawab. Hal ini khususnya terjadi pada rezim terakhir Orde Lama yang mengubah Pancasila menjadi semacam agama politik, yang hanya berperan sebagai penggerak rakyat agar mengabdikan kepada ambisi politik para pemimpin. Sebagaimana Herbert Feith membagi pemimpin-pemimpin Indonesia menjadi dua tipe — penggalang solidaritas dan administrator — begitu pula Orde Lama, ia termasuk tipe penggalang solidaritas yang hanya memperhatikan bidang politik dan melecehkan bidang ekonomi.

Meski terdapat kondisi-kondisi yang tampak tidak menguntungkan, *toh* bangsa Indonesia beruntung karena berhasil mengatasi fase

pertama dan tersulit dalam *nation building*. Perkembangpesatan bahasa nasional, bahasa Indonesia, merupakan hal pertama yang perlu digaribawahi, yang tanpanya Indonesia akan terpecah-pecah oleh begitu banyak kelompok etnis dan bahasa yang berbeda. Dan, yang kedua, tentu saja adalah Pancasila. Bendera, lagu kebangsaan, semboyan, dan simbol-simbol lainnya patut disebutkan; sebab, tidak seperti pada bangsa-bangsa tertentu lainnya, hal-hal ini sudah menjadi kenyataan yang mapan. Satu hal yang sangat pahit untuk disadari ialah bahwa Indonesia, secara potensial, merupakan bangsa “ketiga terkaya di dunia”, namun tingkat kehidupannya masih termasuk yang terendah.

Berdasarkan latar belakang inilah, pemerintah Orde Baru melancarkan kebijaksanaan pembangunan. Yang dimaksud dengan pembangunan atau modernisasi itu ialah upaya sepenuhnya untuk menciptakan suatu sistem sosial yang membantu inovasi bersinambungan tanpa merusak keseluruhan masyarakat, membangun struktur-struktur politik berdasarkan berbagai pendekatan guna menjamin fleksibilitas, dan memberi rakyat kecakapan teknikal agar tetap seirama dengan derap kemajuan teknologi dunia.

Rakyat memandang hal ini sebagai kebijaksanaan paling serius dari bangsa ini untuk mewujudkan tujuan kemerdekaan. Dan hal paling utama ialah pembangunan ekonomi, yang dimaksudkan untuk menciptakan sarana pewujud cita-cita bangsa. Namun, tidak selalu mudah bagi masyarakat untuk menyadari bahwa suatu bangsa baru dan sedang membangun harus melalui suatu masa yang panjang dengan tahap-tahap perencanaan, pembangunan dan penataan kembali masyarakat untuk mencapai suatu garis start (*starting line*). Negara muda yang baru merdeka haruslah melalui suatu fase tak terhindarkan yang penuh dengan kesulitan. Pada awalnya, ia tidak memiliki infrastruktur yang dimiliki oleh negara-negara maju untuk masa sangat panjang.

Maka “memacu modernisasi dalam masa dua puluh tahun” jadi slogan para pemimpin politik. Presiden Soeharto, dalam pidatonya pada 16 Agustus 1971, menekankan bahwa landasan bagi

masyarakat adil dan makmur tidak akan benar-benar terumuskan sampai dua puluh lima tahun mendatang, yaitu setelah kerja keras bersinambungan membangun segala bidang.

Dikatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan berpikir dan bersikap merupakan halangan paling besar bagi pembangunan. Karena itu, salah satu tugas tersulit dalam politik modernisasi ialah mengajak masyarakat agar menghadapi kenyataan-kenyataan tidak populer. Mereka demikian tak sabar, mereka menginginkan buah-buah kemerdekaan sekarang. Namun, di lain pihak, mereka juga demikian khawatir akan efek modernisasi yang kiranya akan mengorbankan kepentingan mereka, baik material maupun non-material.

Sekarang, pemerintah telah yakin untuk lebih baik bergerak ke arah kemajuan ekonomi dengan berlandaskan garis-garis yang luwes, bukannya doktriner. Karena, salah satu dari begitu banyak kesimpulan yang telah dicapai bangsa kita dalam seperempat abad kemerdekaan ialah bahwa slogan-slogan kosong bisa memberikan kepuasan emosional, namun hanya menimbulkan kemiskinan dan kebodohan. Siapa pun yang mempelajari pernyataan-pernyataan dan pidato-pidato para pemimpin kiwari Indonesia akan mengetahui bahwa mereka selalu menekankan agar kita melepaskan diri dari orientasi ideologi berlebihan dan menggantinya dengan pendekatan pragmatis terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa ini. Setelah suatu politisasi yang makan waktu panjang oleh Orde Lama atas segala segi kehidupan, pada permulaannya masalah perubahan mental ini tampaknya tidak teratasi.

Pembarun politik juga selalu ditekankan. Dan sekarang hal itu menjadi salah satu program politik terpenting Golkar selama pemilu. Kampanye pembaruan politik tampaknya dipilih sekadar karena ketiadaan sesuatu yang segar untuk dikatakan. Namun, tidak demikian halnya. Kompartementalisasi politik perlu dicegah, sebab hal ini bisa merongrong stabilitas politik yang sangat diperlukan demi tetap berlangsungnya program besar modernisasi, sekaligus untuk mendidik masyarakat menghadapi masalah nyata keseharian mereka, dan untuk mencegah mereka bersembunyi di balik slogan-slogan.

Modernisasi dan Permasalahan Keagamaan

Dengan demikian, bermulalah upaya modernisasi dan pembangunan ekonomi. Dari segi politik, diperlukan suatu pemerintah yang kuat dan stabil, sekaligus terbuka dan tanggap.

Perpecahan keagamaan, akibat fanatisme sempit, sering dilukiskan sebagai bahaya sosial paling besar dan eksplosif bagi Indonesia yang merdeka. Saya tidak sepenuhnya sepakat dengan penilaian ini, sebab fakta-fakta sejarah tidak mengukuhkannya.

Ada keluhan dari sebagian kelompok Muslim bahwa masyarakat keagamaan tertentu, dalam hal ini Kristen dan Katolik, memperoleh hak-hak istimewa atau kekuasaan tak semestinya di negara ini. Pernyataan semacam itu tidak lagi absah di Indonesia yang merdeka ini. Kalaupun absah, maka hal itu semata-mata dikarenakan oleh adanya warisan kolonial. Namun, kaum Muslim tidak beruntung selama masa penjajahan, bukan saja karena pemerintah Belanda sengaja menjauhkan mereka dari mendekati fasilitas pendidikan — yang merupakan alasan utama — tetapi juga karena pemimpin-pemimpin mereka lebih menyukai isolasionisme.

Namun, adalah mengherankan bila kini kita melihat keadaan tidak adil ini masih berlangsung di Indonesia yang merdeka, khususnya di zaman modern ini. Sebab, sekarang hal itu terus-menerus sedang dikikis oleh kemunculan partisipan-partisipan dan intelektual-intelektual Muslim yang memang diharapkan.

Namun, jangan sampai ada ilusi tentang kenyataan bahwa, bahkan dewasa ini di Indonesia, orientasi dan emosi keagamaan kerap menampilkan kekacauan yang mengganggu, suatu arus bawah ketidakpuasan dan suatu bahaya potensial. Soal ini harus menjadi perhatian setiap pemimpin yang bertanggung jawab.

Dalam proses modernisasi, masalah yang berasal dari agama ini bisa saja terasa lagi, kadang-kadang dengan intensitas yang lebih tinggi. Hal ini karena — sebagaimana diterangkan oleh RA Scalapino — modernisasi, dalam tahap awalnya, berarti pembaratan. Segala yang baru, dalam hal ini, juga bersifat Barat. Kaum

Muslim memiliki perasan khusus tentang hal ini, sebagian dikarenakan alasan-alasan keagamaan (Westernisme mengisyaratkan kekristenan), dan sebagian dikarenakan pengalaman panjang dan pahit mereka dengan Barat yang kolonialis.

Terlebih, dikarenakan kekurangan pengalaman administratif dan perlengkapan pendidikan modern, kaum Muslim menjadi enggan ikut serta dalam modernisasi sepenuhnya, sehingga bersikap lambat dalam segala bentuk perubahan sosial radikal, dan memiliki kecenderungan kuat untuk berlindung di balik doktrin keagamaan, dalam arti sempit. Dalam konteks politik, fanatisme keagamaan tidak digunakan semata-mata untuk pelestarian dan identifikasi diri, namun kadang-kadang juga sebagai imbauan yang menarik. Inilah titik yang di sini toleransi harus benar-benar dikembangkan. Kepemimpinan politik yang bijaksana dan bertanggung jawab harus ditampilkan oleh pemerintah. Meski harus ada disiplin dalam masyarakat, yang di dalamnya semua orang tidak sepenuhnya bebas mengikuti kecenderungan-kecenderungan mereka, tindakan apa pun untuk mempertahankannya yang tidak dapat diterima oleh masyarakat, tidak akan lama bertahan.

Hendaknya jangan sampai ada kesalahpahaman berkenaan dengan mainan ini. Ajaran keagamaan semacam itulah yang merupakan sumber perintang masyarakat ke arah pembangunan. Konservatisme, dikarenakan orientasi tradisionalisnya, memainkan peranan yang lebih besar dalam menciptakan halangan-halangan bagi pembangunan. Dan terlebih, saya percaya, adalah kejahilan masyarakat.

Betapapun, patut diingat di sini, bahwa implikasi keagamaan pembangunan keekonomian hanya merupakan sebagian dari konteks yang lebih besar: implikasi sosial. “Sosial” di sini — sebagaimana diterangkan oleh Eugene Staley — berarti semua aspek hubungan antarmanusia. Selanjutnya ia mengatakan bahwa modernisasi berarti pengubahan hubungan manusia dalam masyarakat. Hal itu merupakan suatu keharusan bagi perubahan-perubahan sosial mendalam sebagai bagian dari modernisasi ekonomi. Namun

masalah demokratisnya ialah bagaimana mendapatkan sarana untuk merangsang dan mengarahkan perubahan-perubahan itu tanpa mengorbankan martabat manusia — hal yang menjadikan pembangunan menjadi sesuatu yang baik.

Tolok Ukur Pembangunan yang Berhasil

Karena itu, salah satu hal yang jelas ialah bahwa pemecahan-pemecahan terhadap masalah-masalah kita tidak selamanya dapat disodorkan dalam kerangka ekonomi saja.

Menurut Eugene Staley, tolok ukur pembangunan yang berhasil di negara-negara yang sedang membangun, seperti Indonesia, ialah:

1. Tingkat produksi dan pendapatan yang lebih tinggi dan merata.
2. Kemajuan dalam pemerintahan sendiri yang demokratis, mantap, dan sekaligus tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan dan kehendak-kehendak rakyat.
3. Pertumbuhan hubungan sosial demokratis, termasuk kebebasan yang meluas, kesempatan-kesempatan untuk pengembangan diri, dan penghormatan kepada kepribadian individu.
4. Tidak mudah terkena komunisme dan totaliterianisme lainnya, karena alasan-alasan tersebut di atas.

Dengan penilaian dasar ini sebagai latar belakang, maka para pemimpin pemerintah kiwari mulai membahas sisi manusiawi pembangunan. Pendekatan terhadap masalah-masalah pembangunan semata-mata dari sudut pandang ekonomi tampaknya terlalu tidak memedulikan efeknya atas masyarakat, aspirasi-aspirasi, rasa dan nilai-nilai mereka. Dan, kian diperhatikannya aspek manusiawi dan sosial pembangunan bersumber pada norma dasar yang telah digariskan sebagai tujuan bangsa: menciptakan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. [❖]